



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jln. Veteran No. 70, Eks. Lap. Poliko, Telp. (0752) 92601, Fax (0752) 92379
Payakumbuh

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 000.8/6.12.130/setda-Pyk/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 26);

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2025,

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



ANANDA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk. Wali Kota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 000.8/6.12.130/setda-Pyk/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																						
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																				
A	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks RB berfungsi juga memastikan pemerintahan terbebas atau bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Inilah yang membuat saat sebuah instansi pemerintah memiliki Indeks RB yang tinggi, maka tujuan-tujuan dari Indeks RB yang telah dipaparkan sebelumnya semakin bisa terwujud	a. Terdapat 3 variabel yaitu (i) komponen (ii) sub komponen dan (iii) indikator, dimana komponen dan sub komponen dialokasikan nilai sebagai berikut :	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengungkit</td> <td>60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Aspek Pemenuhan</td> <td>20%</td> <td>1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Aspek Hasil Antara</td> <td>10%</td> <td>1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) Merit system (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar pelayanan (1%)</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Aspek Reform</td> <td>30%</td> <td>1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%)</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Pengungkit	60%		a.	Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)	b.	Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) Merit system (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar pelayanan (1%)	c.	Aspek Reform	30%	1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%)
No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen																								
1	Pengungkit	60%																									
a.	Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)																								
b.	Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) Merit system (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar pelayanan (1%)																								
c.	Aspek Reform	30%	1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%)																								

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																										
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																								
						<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hasil</td> <td>40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</td> <td>10%</td> <td>1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> <td>Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</td> <td>10%</td> <td>Indeks persepsi anti korupsi (10%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kinerja organisasi</td> <td>10%</td> <td>1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)</td> </tr> </table>				6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)	2	Hasil	40%			a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)		b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)		c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks persepsi anti korupsi (10%)		d. Kinerja organisasi	10%	1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)	
			6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)																												
2	Hasil	40%																													
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)																												
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)																												
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks persepsi anti korupsi (10%)																												
	d. Kinerja organisasi	10%	1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)																												
						<p>b. Setiap sub komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.</p> <p>c. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.</p> <p>d. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.</p>																									

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						<p>e. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.</p> <p>f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: (i) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$; (ii) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; (iii) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.</p> <p>g. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut : (i) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat; (ii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan (iii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja.</p>	

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
						ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja.	$\text{Nilai Kinerja Pemerintahan Daerah} = \frac{\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
			2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Ukuran untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah	<p>Penilaian ITKP dilakukan secara menyeluruh dan kompleks, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sistem pengadaan (seperti SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak). Bobot 30% • Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan.(bobot 30%) • Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bobot 40% <p>Penilaian ini didasarkan pada nilai yang diperoleh, dengan rincian sebagai berikut: Istimewa (nilai 100), Sangat Baik (>90), Cukup (>=50 s.d. 70), dan Kurang (<50)</p>	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ dan Dalbang)
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia oleh KemenPAN-RB berdasarkan 6 (enam) aspek yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalise ASN, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan seta Inovasi Pelayanan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																																	
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																															
					penyelenggara pelayanan publik																																	
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)																														
3		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	<p>Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> <th>Total Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	<p>Nilai AKIP dihitung dengan akumulasi 5 komponen penilaian, dimana masing-masing komponen dibagi menjadi 3 sub komponen dengan persentase yang sudah ditentukan sebagai berikut :</p>	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot																																		
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																		
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																		
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																		
Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																		

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIJA ANANDA